

Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kota Sukabumi

Dede Yusuf Saepudin¹, Nani Nurani Muksin², Imam Nugraha³, Rochman Adimiharja⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹dede.yusufsaepudin@student.umj.ac.id, ²naninuranimuksin@umj.ac.id,

³imam.nugraha@student.umj.ac.id, ⁴rochman.adimiharja@student.umj.ac.id

Submitted: 10/12/2024; Revised: 17/01/2025; Published: 31/01/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.264>

Abstract

Stunting is a serious health problem that has a direct impact on the quality of human resources. Sukabumi City is one of the areas that has not been free from the problem of stunting. With a fairly high prevalence rate, the Sukabumi City Government is committed to reducing the prevalence of stunting through various policies and programs that have been and are being implemented. This article aims to analyze the implementation of policies to reduce the prevalence of stunting in Sukabumi City. The results show that the Sukabumi City Government has collaborated with various institutions from the health, education and social sectors that are integrated in reducing the prevalence of stunting. This collaboration has created synergy between SKPD and the pentahelix elements within it, resulting in several program innovations both at the city and regional levels. In addition, it is supported by the availability of resources including human resources, budget resources, health facilities, and information systems that can support the implementation of the program optimally. From the various programs that have been rolled out, it has shown a good commitment from the policy implementers, but efforts to motivate and increase active participation from the community continue to be made. The Regional Government through the Sukabumi City Health Office in implementing the stunting prevalence reduction program, continues to be committed and motivated to reduce the stunting prevalence rate with the hope of achieving the specified prevalence reduction target.

Keywords: Implementation, Policy, Stunting, Sukabumi

Abstrak

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan serius yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah yang belum terlepas dari permasalahan stunting. Dengan tingkat prevalensi yang cukup tinggi, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi memiliki komitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting melalui berbagai kebijakan dan program yang telah dan sedang dilaksanakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan prevalensi stunting di Kota Sukabumi. Hasil menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga baik dari sektor kesehatan, pendidikan maupun sosial yang terintegrasi dalam mengurangi prevalensi stunting. Kolaborasi tersebut telah menciptakan sinergitas antar SKPD dan elemen pentahelix didalamnya, sehingga menghasilkan beberapa inovasi program baik di tingkat kota maupun kewilayahan. Selain itu didukung dengan ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, fasilitas kesehatan, dan sistem informasi yang dapat mendukung pada pelaksanaan program secara optimal. Dari berbagai program yang telah digulirkan, telah menunjukkan komitmen yang baik dari para pelaksana kebijakan, namun upaya untuk memotivasi dan meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat terus dilakukan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam pelaksanaan program penurunan

prevalensi stunting, terus berkomitmen dan memiliki motivasi untuk menekan angka prevalensi stunting dengan harapan dapat mencapai target penurunan prevalensi yang ditentukan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Stunting, Sukabumi

Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan yaitu sejak dari kehamilan hingga usia dua tahun, yang berakibat pada tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan standar usia dan jenis kelamin (WHO, 2020). Dampak stunting tidak hanya terlihat pada tubuh anak yang lebih pendek dibandingkan teman sebaya, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak yang berujung pada rendahnya kemampuan kognitif, motorik, dan produktivitas di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, UNICEF (*United Nations Childrens Fund*) tidak hanya melihat stunting sebagai masalah fisik, tetapi juga sebagai masalah yang lebih luas yang melibatkan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Banyak faktor yang dapat memperburuk masalah stunting salah satunya menurut WHO dan UNICEF (2019) yaitu kurangnya akses terhadap sanitasi dan air bersih yang dapat memperburuk status gizi anak-anak. Sanitasi yang buruk menyebabkan peningkatan penyakit diare dan infeksi saluran pencernaan, yang mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dan meningkatkan risiko stunting. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi stunting memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan perbaikan dalam sektor gizi, kesehatan, sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan sekitar 30,8% balita mengalami kondisi ini. Pada tahun 2024, Indonesia menargetkan penurunan prevalensi stunting pada balita menjadi di bawah 14%. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi stunting secara signifikan dalam 10 tahun terakhir yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah melakukan intervensi pada berbagai aspek, seperti gizi anak, kondisi rumah, ketersediaan air, dan pendampingan calon pengantin. Meskipun ada penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, angka stunting masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena untuk mencapai target 14% tersebut dibutuhkan penurunan 7,5% dari angka 21,5% pada tahun 2023 (Setneg RI, 2024).

Begitu juga di tingkat daerah, kebijakan penurunan stunting harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di setiap wilayah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam menanggulangi stunting. Kota Sukabumi, sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat, menjadi salah satu daerah yang belum terlepas dari permasalahan serius terkait generasi penerusnya salah satunya permasalahan stunting. Pada Tahun 2021 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Sukabumi sebesar 19,1%. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 19,2%, tahun 2023 sebesar 26,9% (KDP Kota Sukabumi, 2024). Kenaikan ini menunjukkan bahwa tantangan penurunan stunting masih signifikan. Namun berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang menghasilkan angka prevalensi stunting nasional tahun 2023 sebesar 21,5 yang sebelumnya 21,6 pada tahun 2022. Berdasarkan hasil survei tersebut, pemerintah pusat melakukan pemutakhiran terhadap target penurunan prevalensi stunting yang akan dicantumkan ke dalam dokumen perencanaan. Sesuai hasil pemutakhiran, target prevalensi stunting nasional pada tahun 2025 mengalami perubahan menjadi 18,8%. Adapun di Jawa Barat perubahan target penurunan prevalensi stunting tahun 2025 menjadi 19% dan Kota Sukabumi 23,52% yang sebelumnya sebesar 17,49% (KDP Kota Sukabumi, 2024).

Dengan target penurunan prevalensi stunting tersebut, Kota Sukabumi menjadi salah satu lokasi fokus intervensi pencegahan stunting terintegrasi tahun 2025 dengan skema pencegahan khusus berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Sukabumi perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap penurunan prevalensi stunting terutama dalam menghadapi tahun 2025 saat ini.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, sejauh ini telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program yang telah dan sedang dijalankan sebagai upaya untuk mencapai target penurunan stunting yang signifikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah stunting, namun berdasarkan hasil penelitian oleh Marienda (2024) dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Stunting masih sering diartikan hanya sebatas masalah gizi buruk, padahal stunting juga dipengaruhi oleh

faktor-faktor seperti sanitasi yang buruk, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, serta pola makan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Sukabumi sebagai upaya untuk memahami pelaksanaan program penurunan prevalensi stunting dan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kebijakan dan program yang lebih baik.

Tinjauan Pustaka

Teori yang dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai kebijakan publik dan implementasinya sebagai bagian integral dari siklus kebijakan. Kebijakan publik merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bernegara yang berperan penting dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai produk dari proses politik, kebijakan publik mencerminkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara untuk menangani isu-isu yang dianggap sebagai masalah publik. Berbagai teori dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami secara komprehensif bagaimana kebijakan publik terbentuk, diterapkan, dan dievaluasi.

Banyak ahli telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk menganalisis kebijakan publik. Misalnya, Thomas R. Dye (2013) menekankan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dengan memilih alternatif kebijakan tertentu. Sementara itu, James E. Anderson (2011) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi yang bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat. Selain itu, William N. Dunn (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan pada penyelesaian masalah sosial tertentu dan mencerminkan keputusan untuk alokasi sumber daya yang terbatas dalam masyarakat". Dunn menyoroti pentingnya analisis kebijakan dalam merancang kebijakan yang efektif dan efisien.

Selain itu, Edward III (1980) berfokus pada teori implementasi kebijakan, yang menekankan bahwa kebijakan tidak akan berhasil hanya karena baiknya perumusan kebijakan tersebut. Implementasi yang sukses memerlukan koordinasi antar lembaga, komunikasi yang jelas, serta perhatian terhadap sumber daya dan kepemimpinan yang efektif. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami bahwa

implementasi kebijakan yang buruk sering kali terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara perumusan kebijakan dengan kondisi di lapangan.

Lebih lanjut lagi Edward III mengidentifikasi peran penting aktor-aktor dalam implementasi kebijakan, yang meliputi pembuat kebijakan, birokrasi, serta masyarakat. Setiap aktor memiliki peran dalam mengubah kebijakan yang ada menjadi tindakan nyata. Pembuat kebijakan harus memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterjemahkan dengan jelas oleh birokrasi dan diterima oleh masyarakat. Tanpa komunikasi yang jelas antar aktor-aktor ini, kebijakan bisa gagal. Salah satu elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah koordinasi antar lembaga dan kepemimpinan yang jelas. Edward III berpendapat bahwa kebijakan publik harus dijalankan dengan koordinasi yang baik antar berbagai instansi pemerintah yang terlibat. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan bisa tumpang tindih atau bahkan bertentangan.

Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang saling terkait. Dalam teorinya, ia mengidentifikasi empat faktor utama yang menjadi penentu penting dalam implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Dispositions*), dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing faktor tersebut:

1. Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu komunikasi yang efektif antara berbagai aktor dalam proses implementasi kebijakan juga sangat penting untuk kesuksesan kebijakan tersebut. Edward III menganggap bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka antara pembuat kebijakan (politik), pelaksana kebijakan (birokrasi), dan penerima kebijakan (masyarakat atau sektor terkait) akan meminimalkan ketidakpahaman dan salah interpretasi yang dapat menghambat implementasi.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya yang cukup, baik itu keuangan, tenaga kerja, material, maupun infrastruktur, merupakan salah satu variabel kunci dalam implementasi kebijakan. Edward III berpendapat bahwa kebijakan yang baik pun tidak akan berhasil tanpa adanya sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaannya. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan bisa gagal meskipun sudah memiliki desain yang baik.

3. Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi atau sikap yang dimiliki oleh pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga sangat memengaruhi kesuksesan kebijakan tersebut. Sikap di sini merujuk pada motivasi, komitmen, dan orientasi aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan—terutama para birokrat dan pemangku kepentingan di lapangan. Edward III mengemukakan bahwa sikap positif dari mereka yang terlibat dapat memperlancar implementasi kebijakan, sementara sikap negatif, seperti resistensi atau ketidakpedulian terhadap kebijakan, dapat menghambatnya.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Struktur birokrasi yang ada dalam suatu negara atau organisasi pemerintah sangat berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Edward III mengemukakan bahwa struktur birokrasi yang jelas, dengan peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, sangat membantu dalam mengimplementasikan kebijakan secara efisien. Struktur birokrasi juga menentukan seberapa efektif koordinasi antar instansi dalam menjalankan kebijakan yang sama.

Dari faktor-faktor tersebut di atas, Edward III memberikan kontribusi penting dalam teori implementasi kebijakan dengan menekankan bahwa faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dengan cermat agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan kebijakan tidak hanya tergantung pada perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat, sejauh mana sumber daya yang tersedia, sikap dan komitmen aktor yang terlibat, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, untuk mencapai implementasi kebijakan yang sukses, empat variabel ini harus diperhatikan dan dikelola dengan baik dalam praktik kebijakan publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Moleong (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik itu mengenai perilaku, makna, pengalaman, ataupun persepsi yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Sama halnya menurut Creswell (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami, dengan memfokuskan pada pengalaman individu atau kelompok tertentu. Penelitian kualitatif cenderung mengutamakan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah atau fenomena, serta menggali makna yang terkandung dalam pengalaman atau pandangan yang diperoleh dari partisipan.

Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman terhadap makna, pengalaman, dan pandangan yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan peserta, biasanya menggunakan wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Metode ini bersifat induktif, yang berarti teori atau pemahaman lebih sering muncul setelah analisis data, bukan di awal penelitian. Creswell juga menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menyajikan narasi yang kaya yang mengungkapkan pengalaman manusia dengan cara yang dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dunia sosial.

Informan dari penelitian ini diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. Michael Q. Patton dalam bukunya *Qualitative Research & Evaluation Methods* (2002) menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih individu atau kasus berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Patton menekankan bahwa teknik ini berguna untuk memperoleh informasi yang mendalam dan kaya dari peserta yang memiliki pengalaman atau perspektif yang sangat relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Sama halnya dengan John W. Creswell dalam bukunya *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2014) menjelaskan bahwa *purposive sampling* digunakan ketika peneliti secara sadar memilih peserta yang memiliki karakteristik tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi penting untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun informan

yang dianggap memiliki pengalaman atau perspektif yang relevan dengan kebijakan stunting di Kota Sukabumi ialah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

Pembahasan

Pada bagian ini akan disajikan bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Sukabumi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III.

Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana komunikasi antar pihak-pihak terkait dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Sukabumi yang tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen yang terlibat dalam program ini dapat bekerja secara efektif dan terkoordinasi. Komunikasi yang baik akan memfasilitasi pertukaran informasi, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting ialah melibatkan berbagai pihak diantaranya antar lembaga pemerintah (Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan), Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu, dan Masyarakat.

Dari pihak-pihak terkait tersebut, pemerintah daerah membangun sinergi untuk melawan stunting di Kota Sukabumi melalui inovasi dan kolaborasi (KDP Kota Sukabumi, 2024). Diketahui bahwa kenaikan prevalensi stunting setiap tahunnya di Kota Sukabumi berdasarkan hasil analisa data 29 indikator stunting *essential* dan 35 indikator *supply*, terdapat beberapa penyebab di antaranya adalah koordinasi dan kolaborasi, satu data sasaran, pendampingan dan edukasi, serta pelaporan dan monitoring evaluasi. Kolaborasi yang dibangun bukan hanya dengan lintas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) namun melibatkan elemen pentahelix didalamnya (Kusmana, 2024).

Upaya kolaborasi yang digulirkan ini telah melahirkan beberapa inovasi baik di tingkat kota maupun kewilayahan yaitu sebagai berikut: Pertama, Inovasi Sistem Informasi Data Stunting Terintegrasi (Si Update) sebuah aplikasi hasil integrasi e-ppgbm, pendataan keluarga, dan Sister yang merupakan aplikasi pencatatan bantuan bagi balita dan keluarga berisiko stunting. Kedua, program berkelanjutan dari pelaksanaan

pemberian PMT bagi 500 orang baduta dan ibu hamil dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Ketiga, inovasi cegah stunting dari hulu dengan sasaran remaja pelajar sekolah SMP dan SMA yang merupakan komitmen bersama mendukung minum TTD (Tablet Tambah Darah) bagi remaja putri antara Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Disdik dan Kemenag. Keempat, program kerja sama dengan Indosat untuk memudahkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencatatan dan pelaporan pendampingan secara berkala. Adapun inovasi kewilayahan yaitu: Takan Canting (Taman Sayuran di Pekarangan untuk cegah anak stunting), Pasukan Bunda (PAUD Suka Ikan, sayuran dan buah-buahan), Posrem (Posyandu Remaja) dan Lemon Skul (Lurah Keliling Monitoring ke Sekolah Unggulan).

Kolaborasi lainnya dalam tingkat kewilayahan, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara masif memberikan edukasi kepada para remaja terkait pencegahan stunting yang dimulai sejak usia dini (KDP Kota Sukabumi, 2024). Edukasi tersebut dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan permasalahan stunting di Kota Sukabumi. Selain itu juga diadakan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu yang merupakan lembaga kemasyarakatan di wilayah. Posyandu menjadi pusat layanan dasar terutama dalam pemantauan tumbuh kembang bayi, balita, ibu hamil, dan calon pengantin. Sasaran pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak ditujukan kepada seluruh sasaran (100%) ibu hamil, balita, dan calon pengantin (catin) yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 di posyandu. Kemudian program lainnya yaitu GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang tidak dapat diabaikan sebagai usaha untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat.

Sumber Daya (*Resources*)

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui Dinas Kesehatan memiliki berbagai sumber daya yang tersedia dalam mendukung implementasi kebijakan penurunan stunting. Sumber daya tersebut meliputi aspek Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya anggaran, dan sumber daya infrastruktur dan atau fasilitas layanan Kesehatan.

Dari sisi SDM, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi memiliki tenaga medis dan non medis yang terlatih seperti dokter, bidan, perawat dan kader kesehatan di tingkat Posyandu yang memiliki peranan penting dalam memantau kesehatan ibu hamil, anak

balita dan penanganan gizi buruk. Ketersediaan SDM tersebut selalu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan penyuluhan untuk kader-kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat terkait dengan pentingnya gizi yang seimbang, pemberian ASI eksklusif, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam deteksi dini masalah gizi dan stunting. Adapun dari sumber daya anggaran, dialokasikan untuk berbagai program yang berkaitan dengan penurunan stunting, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), suplemen gizi, serta program pemantauan dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan dana untuk mendukung berbagai program penurunan stunting serta bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin, terutama ibu hamil dan balita, yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan yang baik, serta mencegah terjadinya stunting.

Selain SDM dan anggaran, sumber daya lain yang tersedia adalah ketersediaan infrastruktur dan fasilitas layanan Kesehatan. Puskesmas menjadi pusat layanan kesehatan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab untuk memantau pertumbuhan balita, memberikan imunisasi, serta memberikan layanan kesehatan dasar kepada ibu hamil dan anak. Puskesmas juga berperan dalam kampanye pencegahan stunting dan pemantauan status gizi. Kemudian Posyandu yang merupakan ujung tombak dalam pengawasan kesehatan anak di tingkat kelurahan. Melalui Posyandu, pemerintah daerah bisa memantau berat badan, tinggi badan, serta melakukan deteksi dini terhadap masalah gizi pada balita.

Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penurunan stunting merujuk pada sikap, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi masalah stunting. Beberapa aspek disposisi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting ditunjukkan oleh komitmen yang kuat dalam penurunan stunting dengan menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan kesehatan daerah. Salah satu indikasi komitmen ini adalah dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program penurunan stunting, baik dari APBD Kota Sukabumi maupun melalui

partisipasi dalam program-program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat salah satunya dalam program Intervensi Serentak Pencegahan Stunting.

Disposisi pemerintah daerah Kota Sukabumi juga tercermin dalam upaya pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat. Pemerintah bekerja sama dengan Posyandu dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan stunting, serta memantau status gizi balita secara rutin. Pemberdayaan kader kesehatan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih menjangkau masyarakat di tingkat bawah dan memastikan bahwa program-program penurunan stunting diterima dengan baik. Pemerintah Kota Sukabumi menyadari pentingnya edukasi dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pola makan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah telah aktif melakukan penyuluhan melalui berbagai media dan kegiatan, seperti kampanye melalui media sosial, penyuluhan di Posyandu, Puskesmas, dan sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya stunting dan pentingnya gizi yang seimbang bagi ibu hamil dan balita. Selain itu disposisi Pemerintah Kota Sukabumi terlihat dalam penyediaan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan gizi. Pemerintah daerah aktif mendukung penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, imunisasi, serta pemberian vitamin A. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berupaya memastikan agar fasilitas kesehatan di Kota Sukabumi, seperti Puskesmas, Posyandu, dan rumah sakit, dapat memberikan pelayanan yang memadai untuk pencegahan dan penanganan stunting.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari berbagai upaya tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi pada tahun 2024 melaksanakan audit kasus stunting yang dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya “Zero New Stunting”. Audit kasus stunting ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Salah satu rencana aksi tersebut adalah pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) guna mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting dan mendukung terwujudnya “Zero New Stunting” di Jawa Barat. Audit Kasus Stunting merupakan langkah penting untuk memahami, mengevaluasi dan menangani masalah stunting secara komprehensif (Yadi, 2024). Seperti yang diketahui bahwa stunting merupakan masalah kesehatan yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dalam jangka pendek maupun

panjang, memerlukan penanganan serius. Program "Mentari Berdasi" dari Dinas Dalduk Kota Sukabumi juga disebutkan sebagai salah satu upaya signifikan dalam penurunan stunting. Program ini memaksimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan deteksi dini pada keluarga berisiko stunting. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kota Sukabumi masih berada pada angka 5,69% pada Februari 2024 dengan 1.065 balita *stunted*, dan meningkat menjadi 6,38% pada Juni 2024 dengan 1.291 balita. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tantangan penurunan stunting masih signifikan (KDP Kota Sukabumi, 2024). Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pihak melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan juga Masyarakat (Hasan, 2024).

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan prevalensi stunting melibatkan berbagai instansi dan lembaga yang saling berkoordinasi. Pemerintah daerah Kota Sukabumi berusaha untuk memastikan kebijakan ini dilaksanakan dengan efektif melalui pembagian tugas dan peran yang jelas antar sektor. Struktur birokrasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Sukabumi tentu yang memegang peran strategis dalam menetapkan arah kebijakan dan memberikan arahan terkait penurunan prevalensi stunting adalah Wali Kota sebagai kepala daerah. Wali Kota bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasi seluruh kebijakan dan program penurunan stunting Keputusan penting, alokasi anggaran, serta kebijakan terkait stunting akan berada di bawah kewenangan Wali Kota. Kemudian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi (Setda) mendukung Wali Kota dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program. Setda juga memiliki peran penting dalam koordinasi antar SKPD, penyusunan anggaran, serta evaluasi implementasi kebijakan.

Selanjutnya adalah Dinas Kesehatan yang merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kota Sukabumi. Dinas Kesehatan mengkoordinasikan berbagai program kesehatan yang berkaitan dengan gizi, pemantauan pertumbuhan anak, pelayanan kesehatan ibu hamil, serta pelayanan Posyandu dan Puskesmas. Program seperti pemberian makanan tambahan (PMT), imunisasi, serta

pemberian ASI eksklusif juga menjadi bagian dari tugas Dinas Kesehatan. Selain Dinas Kesehatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda Kota Sukabumi berperan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Bappeda terlibat dalam penyusunan perencanaan anggaran dan program yang berkaitan dengan penurunan stunting. Kemudian Dinas Sosial yang memiliki peran dan tugas penting dalam mendukung keluarga berisiko tinggi terhadap stunting, seperti keluarga miskin. Dinas Sosial menjalankan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat digunakan untuk mendukung ibu hamil dan balita dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

Kemudian lembaga lainnya yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat ialah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Kader Kesehatan. Posyandu adalah lembaga pelayanan kesehatan yang sangat penting dalam penurunan stunting. Posyandu, yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan dari pemerintah, berperan dalam pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan edukasi kepada orang tua. Sedangkan kader kesehatan yang terlatih di Posyandu memiliki peran kunci dalam melakukan deteksi dini terhadap masalah gizi dan kesehatan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dilaksanakan dengan menjalin komunikasi dan kolaborasi antar SKPD dan melibatkan elemen pentahelix. Melalui kolaborasi tersebut, telah banyak melahirkan berbagai program inovasi yang dilaksanakan untuk menurunkan prevalensi stunting di Kota Sukabumi. Selain komunikasi, faktor lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan penurunan stunting adalah ketersediaan sumber daya. Adapun sumber daya yang tersedia adalah sumber daya manusia (tenaga kerja, dokter, bidan, perawat dan kader Kesehatan) sumber daya anggaran dan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan.

Kemudian disposisi atau sikap Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting mencakup komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah stunting melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Selain itu juga didukung oleh struktur birokrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang

melibatkan berbagai SKPD dan lembaga yang saling bekerja sama. Lembaga dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial, memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurangi prevalensi stunting. Pemimpin daerah, seperti Wali Kota, bersama dengan dinas terkait dan masyarakat, memiliki peran sentral dalam melaksanakan kebijakan ini secara efektif.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking: An Introduction*. Boston: Wadsworth Publishing.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New York: Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- Edward III. (1980). *Implementation of Public Policy: The Role of Political Leadership and Bureaucracy*. University of Chicago Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods. Third Edition*. California: Sage Publications
- Wiguna, Meigawati, Amirulloh. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. Volume 6 Nomor 1, hal 28-37.
- Marienda, Rachmawati (2024). Implementasi Program Penurunan Stunting di Kota Sukabumi. *10* (22), hal 1039-1047.